

202210110311438
Diana Chilyatun Nailufar
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS POTENSI PELANGGARAN PASAL 17 DAN PASAL
19 UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM KEBIJAKAN PASOKAN BBM
PERTAMINA KEPADA SPBU SWASTA**

Oleh

**DIANA CHILYATUN NAILUFAR
202210110311438**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2026

202210110311438
Diana Chilyatun Nailufar
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS POTENSI PELANGGARAN PASAL 17 DAN PASAL 19 UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM KEBIJAKAN PASOKAN BBM PERTAMINA KEPADA SPBU SWASTA

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh
DIANA CHILYATUN NAILUFAR
202210110311438



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2026**

**ANALISIS YURIDIS POTENSI PELANGGARAN PASAL 17 DAN PASAL
19 UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM KEBIJAKAN PASOKAN BBM
PERTAMINA KEPADA SPBU SWASTA**

Diajukan Oleh:

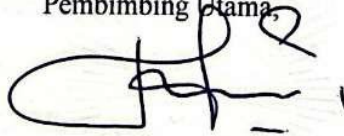
DIANA CHILYATUN NAILUFAR

202210110311438

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,

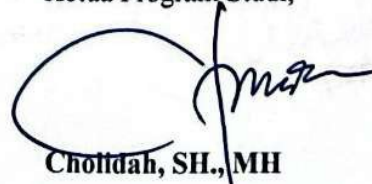


Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Prof. Dr. A. S. Anwar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DIANA CHILYATUN NAILUFAR

202210110311438

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIANA CHILYATUN NAILUFAR

NIM : 202210110311438

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS POTENSI PELANGGARAN PASAL 17 DAN PASAL 19 UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM KEBIJAKAN PASOKAN BBM PERTAMINA KEPADA SPBU SWASTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 April 2026



UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

“jalani semua dengan tenang, dan sabar”



ABSTRAK

Nama : Diana Chilyatun Nailufar
Nim : 202210110311438
Judul : Analisis Yuridis Potensi Pelanggaran Pasal 17 Dan Pasal 19
UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Kebijakan Pasokan BBM
Pertamina Kepada SPBU Swasta
Pembimbing : Dr. Herwastoeti, S.H.M.Si.
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M

Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 dalam kebijakan pasokan BBM PT Pertamina (Persero) kepada SPBU swasta, khususnya terkait kontroversi pasokan tahun 2024-2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, literatur hukum persaingan usaha, dan dokumen resmi terkait kasus pembatasan pasokan base fuel serta kebijakan impor BBM. Hasil penelitian menunjukkan tindakan Pertamina berpotensi melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 karena memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan. Pertamina menguasai lebih dari 90% pangsa pasar distribusi BBM nasional dengan kendali penuh atas infrastruktur kritis. Praktik pemberian base fuel berkualitas rendah dengan kandungan etanol tidak sesuai spesifikasi, dikombinasikan dengan pembatasan kuota impor yang timpang, mengakibatkan SPBU swasta mengalami kelangkaan pasokan dan ancaman penutupan usaha. Analisis rule of reason menunjukkan dampak negatif lebih besar daripada efisiensi yang diklaim. Pembahasan mengungkapkan tindakan Pertamina juga berpotensi melanggar Pasal 19 UU No. 5/1999 tentang penguasaan pangsa pasar yang mengakibatkan praktek monopoli. Dominasi Pertamina mencapai 92,3% diperkuat regulasi pemerintah menciptakan hambatan struktural bagi kompetitor. Praktik diskriminatif dalam alokasi kuota impor—Pertamina Patra Niaga memperoleh 613.000 kiloliter sementara badan usaha swasta hanya 7.000-44.000 kiloliter—menunjukkan strategi sistematis mempertahankan monopoli. Kondisi ini mengakibatkan distorsi pasar, penurunan investasi sektor energi, dan ancaman terhadap ketahanan energi nasional.

Kata Kunci: Posisi Dominan, Praktek Monopoli, Pertamina

ABSTRACT

Name : *Diana Chilyatun Nailufar*
Nim : *202210110311438*
Title : *Legal Analysis of Potential Violations of Article 17 and Article 19 of Law No. 5 of 1999 in Pertamina's Fuel Supply Policy to Private Gas Stations*
Adviser : *Dr. Herwastoeti, S.H.M.Si.*
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M

This study aims to analyze the potential violation of Article 17 and Article 19 of Law No. 5 of 1999 in PT Pertamina (Persero)'s fuel supply policy to private gas stations, particularly regarding the 2024-2025 supply controversy. The research method uses a normative juridical approach with statutory and conceptual analysis. Data were collected through a literature review of laws and regulations, KPPU decisions, competition law literature, and official documents related to the base fuel supply restriction case and the fuel import policy. The results show that Pertamina's actions have the potential to violate Article 17 of Law No. 5/1999 because they fulfill the elements of abuse of dominant position. Pertamina controls more than 90% of the national fuel distribution market share with full control over critical infrastructure. The practice of providing low-quality base fuel with ethanol content that does not meet specifications, combined with unequal import quota restrictions, has resulted in private gas stations experiencing supply shortages and the threat of business closure. Rule of reason analysis shows that the negative impact is greater than the claimed efficiency. The discussion revealed that Pertamina's actions also potentially violate Article 19 of Law No. 5/1999 concerning market share control, resulting in monopolistic practices. Pertamina's dominance, reaching 92.3%, is reinforced by government regulations, creating structural barriers for competitors. Discriminatory practices in import quota allocation—Pertamina Patra Niaga receives 613,000 kiloliters while private companies only receive 7,000-44,000 kiloliters—demonstrate a systematic strategy to maintain the monopoly. This situation results in market distortion, decreased investment in the energy sector, and threatens national energy security.

Keywords: *Dominant Position, Monopolistic Practices, Pertamina*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam setiap langkah perjalanan ini, penulis merasakan betapa besar kasih sayang-Nya yang tidak pernah putus, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Potensi Pelanggaran Pasal 17 Dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Kebijakan Pasokan BBM Pertamina Kepada SPBU Swasta”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H.M.Si. dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M selaku dosen pembimbing yang sangat luar biasa dan sabar dalam memberikan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini dengan hasil yang maksimal.
5. Ibu tercinta, yang telah berpulang ke rahmatullah sejak penulis duduk di bangku SMA. Meskipun Ibu tidak dapat mendampingi penulis secara langsung di setiap langkah perjalanan ini, penulis yakin Ibu tetap mengiringi dan menjaga dari sana. Kehilangan Ibu di usia muda adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh, namun justru menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan membuktikan bahwa penulis bisa. Setiap pencapaian ini adalah untuk Ibu, sebagai bukti bahwa doa dan didikan Ibu tidak sia-sia. Terima kasih telah menjadi malaikat terbaik dalam hidup penulis. Semoga pencapaian ini bisa menjadi salah satu kebanggaan Ibu di sana dan menjadi amal jariyah yang mengalir untuk Ibu. Al-Fatihah.
6. Ayah, yang meskipun di awal ragu untuk mendukung pilihan kuliah swasta dengan segala pertimbangannya, namun pada akhirnya tetap mendukung penulis hingga detik ini. Pengorbanan dan kepercayaan Ayah adalah hadiah terindah yang tidak akan pernah penulis lupakan.

7. Kakak Perempuan tersayang, terima kasih telah menjadi sosok pengganti ibu untuk penulis, terima kasih telah menjadi tempat bersandar, pemberi semangat, dan selalu ada dalam setiap kondisi. Kehadiranmu memberikan kekuatan yang luar biasa di tengah badai kehidupan yang harus penulis hadapi. Penulis tau ini juga bukan hal yang mudah untuk kamu, tapi kamu bisa dan penulis bangga sama kamu.
8. Kepada seluruh teman-teman yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Sahabat Gawendenggg33x, teman-teman kelas "LAW (H)" yang berjuang bersama dari awal hingga lulus dengan kerja keras dan kebersamaan yang membuahkan hasil, teman-teman kost Griya Azzahra yang menjadi tempat pelarian dan rumah kedua yang hangat di tengah kesibukan, teman-teman Agenda Mingguan yang terbentuk di akhir perkuliahan dan menghadirkan kenangan indah melalui hal-hal baru setiap harinya, dari sekadar kumpul bersama hingga menjelajahi sudut Malang yang tersembunyi, serta teman-teman SMA yang hingga kini masih saling mendukung meski terpisah kampus dan kota terima kasih atas setiap dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah membuat masa kuliah dan perjalanan hidup saya menjadi lebih berarti dan tak terlupakan.
9. Kepada penulis sendiri, terima kasih sudah mau bertahan dan berjuang. Terima kasih telah kuat dan tetap melanjutkan hidup dalam kondisi yang tidak mudah, terima kasih telah tetap berdiri meski harus melalui masa kuliah tanpa didampingi peran seorang ibu. Kamu kuat karena cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang kamu cintai dan sayangi, dan itu sudah lebih dari cukup. Kamu layak bangga pada diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan. Namun kesempurnaan bukanlah tujuan, yang terpenting adalah penulis telah menyelesaikannya dengan segenap kemampuan dan perjuangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua serta memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Malang,.....Januari 2026

Diana Chilyatun Nailufar

DAFTAR ISI

<i>TUGAS AKHIR</i>	<i>i</i>
<i>LEMBAR PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>SURAT PERNYATAAN</i>	<i>iv</i>
<i>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)</i>	<i>v</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>vi</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>viii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>x</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>12</i>
A. Latar Belakang.....	<i>22</i>
B. Rumusan Masalah.....	<i>36</i>
C. Tujuan Penelitian.....	<i>37</i>
D. Manfaat Penelitian	<i>37</i>
E. Kegunaan Penelitian	<i>38</i>
F. Metode Penelitian.....	<i>39</i>
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i>	<i>44</i>
1. Konsep Teoritis dan Yuridis Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Pertamina (BUMN).....	<i>44</i>
2. Konsep Teoritis dan Yuridis Mengenai Penghambatan Akses Pasokan dalam Persaingan Usaha	<i>59</i>
<i>BAB III</i>	<i>77</i>
<i>PEMBAHASAN</i>	<i>77</i>
A. Analisis Tindakan Pertamina sebagai Pemasok BBM kepada SPBU Swasta dalam Perspektif Penyalahgunaan Posisi Dominan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999	<i>77</i>
B. Analisis Tindakan Pertamina dalam Membatasi Pasokan BBM kepada SPBU Swasta dalam Perspektif Penghambatan Akses Pasokan Pasal 19 Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.....	<i>98</i>
<i>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</i>	<i>123</i>
A. Kesimpulan	<i>123</i>

B. Saran.....	124
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	<i>128</i>





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Diana Chilyatun Nailufar
2. No. Induk Mahasiswa : 202210110311438
3. Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Potensi Pelanggaran Paral 17 dan Pasal 19 No. 5 tahun 1999 Dalam Kebijakan Pasokan BBM PERTAMINA Kepada SPBU Swasta
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. 22/10/2025 s/d 23/01/2026..

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
	22/10/2025	[Signature]		Konkritasi Bab I
	4/11/2025	[Signature]		Bab I kerjakan
	19/11/2025		[Signature]	Revisi Bab I
	17/12/2025	[Signature]		lanjut Bab II
	1/12/2025	[Signature]		Bab I Revisi
	12/12			lanjut Bab II
	23/12/2025	[Signature]		Bab I & II
	12/12			ace lanjut
	10/1/2026	[Signature]		Bab III
	11/1			Bab III ace
	12/1/2026	[Signature]		Bab IV ide
	15/1/2026		[Signature]	Revisi
	12/1/2026	[Signature]		ace keseluruhan
	15/1/2026		[Signature]	Revisi Bab I
				Metode Penelitian
				Selamatan Akadab
	23/1/26		[Signature]	Silahkan Daftar Sidang

DAFTAR PUSTAKA

- Areeda, Phillip. "Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles." *Antitrust Law Journal*, Vol. 58, No. 3 (1989): 841-843.
- Avi-Yonah, Reuven S. and Orli Avi-Yonah. "Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State." *Harvard Law Review*, Vol. 113, No. 7 (2000): 1573-1676.
- Ayudya Putri, I.G.A., et al. "Penerapan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 2 (2023): 178-195.
- Bouchez, L.J. "The Nature and Scope of State Immunity from Jurisdiction and Execution." *Netherlands Yearbook of International Law*, Vol. 10 (1979): 9-43.
- Brodley, Joseph F. "Predatory Pricing and Vertical Foreclosure in Competition Law." *Antitrust Law Journal*, Vol. 88, No. 3 (2022): 567-592.
- Carlton, Dennis W. and Jeffrey M. Perloff. *Modern Industrial Organization*, 5th Edition. London: Pearson Education, 2020.
- Crémer, J., Y.A. de Montjoye, and H. Schweitzer. *Competition Policy for the Digital Era*. European Commission Report, 2021.
- DPR RI. Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi XII dengan Pertamina Patra Niaga, 1 Oktober 2025.
- European Commission. "Guidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying Article 82 EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings." *Official Journal C* 45, 24.2.2009. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009XC0224\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009XC0224(01)).
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Ginting, Elyta Ras. "Kedudukan Hukum KPPU Sebagai Lembaga Independen Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 1 (2015): 128-130.
- Ginting, Jamin. *Hukum Persaingan Usaha: Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Hansen, Knud, et al. "State-Owned Enterprises and Competition Policy in Indonesia." Working Paper Series, Indonesia Infrastructure Initiative, 2015.

<https://www.adb.org/publications/state-owned-enterprises-competition-policy>.

Hayati, Nur. "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 (2021): 109-122.

Herjawan, H. "Hak Menguasai Negara dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan." *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023, hlm. 42–61.

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2020.

Hovenkamp, Herbert. *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice*, 6th Edition. St. Paul: West Academic Publishing, 2020.

Hapsari, Dwi Ratna Indri dan Kukuh Dwi Kurniawan, "Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2021, hlm. 215-230.

Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Permen ESDM No. 12 Tahun 2015.

Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Surat Edaran tentang Pembatasan Kenaikan Impor Bensin Non-Subsidi. SE No. T-19/MG.05/WM.M/2025, 17 Juli 2025.

International Energy Agency (IEA). "Energy Security and Resilience: Best Practices." IEA Report, 2022.

Imantaka, B., Yudha, H.S., Gilalo, J.J., dan Ilyanawati, R.Y.A. "Imunitas BUMN untuk Melakukan Monopoli." *Karimah Tauhid*, Vol. 2, No. 3, 2023. Tersedia di: <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9428>

Jakarta Satu. "KPPU Peringatkan: Aturan Batas Impor BBM Non-Subsidi Bisa 'Matikan' Persaingan, Pertamina Diuntungkan Besar." 18 September 2025. <https://jakartasatu.com/2025/09/18/kppu-peringatkan-aturan-batas-impor-bbm-non-subsidi-bisa-matikan-persaingan-pertamina-diuntungkan-besar/>.

"Kandungan Etanol 3,5 Persen Bikin Vivo dan BP-AKR Batal Beli Base Fuel dari Pertamina." *Tribunnews.com*, 2 Oktober 2025.

"Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Pemerintah dan KPPU Angkat Bicara." *Bogor Today*, 10 September 2025. <https://bogor-today.com/2025/09/10/kelangkaan-bbm-di-spbu-swasta-pemerintah-dan-kppu-angkat-bicara>.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Kementerian ESDM. *Statistik Minyak Bumi 2024*. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Jakarta, 2024.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Dampak Kelangkaan BBM terhadap Kesejahteraan Konsumen." Kajian KPPU, Oktober 2025.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Pedoman Pasal 17 (Posisi Dominan) UU No. 5 Tahun 1999." Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jakarta: KPPU, 2011.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. BN 2023 No. 294.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan Nomor 04/KPPU-L/2004 tentang Tender Pengadaan Pelumas PT PLN (Persero), 2004.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan Nomor 05/KPPU-L/2004 tentang Tender Pengadaan Minuman Isotonik PT Garuda Indonesia, 2004.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Penetapan Harga Minyak Goreng, 2007.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan Nomor 22/KPPU-I/2007 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Jasa Angkutan Peti Kemas di Pelabuhan Belawan, 2007.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan Nomor 17/KPPU-I/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Penetapan Tarif SMS, 2009.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan Nomor 15/KPPU-I/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Belawan, 2010.

Kompas. "Aturan Impor BBM Bikin SPBU Swasta Merana, KPPU: Pilihan Konsumen Berkurang." 19 September 2025. <https://money.kompas.com/read/2025/09/19/084137226/aturan-impor-bbm-bikin-spbu-swasta-merana-kppu-pilihan-konsumen-berkurang>.

KPPU. "KPPU Dalam Kelangkaan BBM Non Subsidi, Jaga Agar Tak Ada Praktik Monopoli." 9 September 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-selidiki-kelangkaan-bbm-non-subsidi-cegah-monopoli-pasar-lt68bf95f809dc4/>.

KPPU. "KPPU: Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Pengaruhi Operasional Badan Usaha Swasta." Siaran Pers No. 065/KPPU-PR/IX/2025, 18 September 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-kebijakan-pembatasan-impor-bbm-non-subsidi-pengaruhi-operasional-badan-usaha-swasta-lt68cd0f37ce688/>.

Kurniawan, T. "Dualisme Peran BUMN: Antara Agen Pembangunan dan Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 4 (2021): 889-912.

Lahadalia, Bahlil. Pernyataan Menteri ESDM dalam Konferensi Pers, 28 Oktober 2025. Dikutip dari: CNN Indonesia, "Menteri ESDM Sindir SPBU Swasta Soal Kelangkaan BBM".

Lubis, Andi Fahmi, et al. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.

Lubis, Andi Fahmi, et al. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Edisi Revisi. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan KPPU, 2020.

"Menteri Bahlil Sindir SPBU Swasta: Jangan Memaksakan Kehendak." *Tempo.co*, 28 Oktober 2025. <https://bisnis.tempo.co/read/1896745/menteri-bahlil-sindir-spbu-swasta-jangan-memaksakan-kehendak>.

- Motta, Massimo. *Competition Policy: Theory and Practice*, 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Ningrum, S.S. "Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Hukum Persaingan Usaha: Analisis Rule of Reason." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 41, No. 2 (2022): 156-173.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nur, Deswin. "Pembatasan Impor BBM Berpotensi Hambat Persaingan." Wawancara KPPU, 20 September 2025.
- OECD. "Abuse of Dominance in Digital Markets." OECD Competition Committee Discussion Paper, 2020. <https://www.oecd.org/daf/competition/abuse-of-dominance-in-digital-markets-2020.pdf>.
- OECD. "Competition and Investment: Evidence from OECD Countries." OECD Competition Policy Roundtable, 2021.
- OECD. "State-Owned Enterprises and the Principle of Competitive Neutrality." OECD Policy Brief, 2015. <https://www.oecd.org/corporate/SOEs-Competitive-Neutrality.pdf>.
- "Pengamat UGM: Kelangkaan BBM Swasta Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8%." *CNN Indonesia*, 15 September 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/pengamat-ugm-kelangkaan-bbm-swasta-ancam-target-pertumbuhan-ekonomi>.
- Porter, Michael E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press, 2020.
- Radhi, Fahmy. "Kelangkaan BBM dan Dampaknya terhadap Investasi." Wawancara dengan UGM Radio, 5 Oktober 2025.
- Ramadhani, M. F. "SPBU Shell Terancam PHK Massal Akibat Kelangkaan BBM." *Tempo.co*, 15 September 2025.
- Rangga, Wiesma Mara. "Pembentukan Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sektor Infrastruktur Ditinjau dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat." Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Sarjana, I Made dan Putu Gede Arya Sumerthana. "Penghambatan Akses Pasokan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 11 (2019): 6-7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53686>.

Schmalensee, Richard and Robert Willig (eds.). *Handbook of Industrial Organization*, Volume II. Amsterdam: Elsevier, 2020.

Sidak, J.G. & D.J. Teece. "Dynamic Competition in Antitrust Law." *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 5, No. 4 (2021): 581-631.

Silalahi, Udin. *Analisis Hukum Persaingan Usaha dalam Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.

Sirait, Ningrum Natasya. "Kedudukan BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 2 (2017): 234-236.

Sirait, Ningrum Natasya. "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Tertutup." *Hukumonline*, 7 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perspektif-hukum-persaingan-usaha-terhadap-perjanjian-tertutup-1t677d60eb2dd60?page=all>.

Soekarno, Wahyu Adi. *Analisis Posisi Dominan dan Abuse of Dominance dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

"SPBU Shell di Bekasi Ancam Rumahkan 50% Karyawan Akibat Kelangkaan BBM." *Detik.com*, 12 September 2025. <https://finance.detik.com/energi/d-7528394/spbu-shell-di-bekasi-ancam-rumahan-50-karyawan-akibat-kelangkaan-bbm>.

Tanjung, Kurnia Togar Pandapotan. "State Action Doctrine dalam Hukum Persaingan Usaha." Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Tempo. "Kementerian ESDM Respons Investigasi KPPU soal Impor BBM." 10 September 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-esdm-respons-investigasi-kppu-soal-impor-bbm-2068548>.

Tirole, Jean. *The Theory of Industrial Organization*, 2nd Edition. Cambridge: MIT Press, 2021.

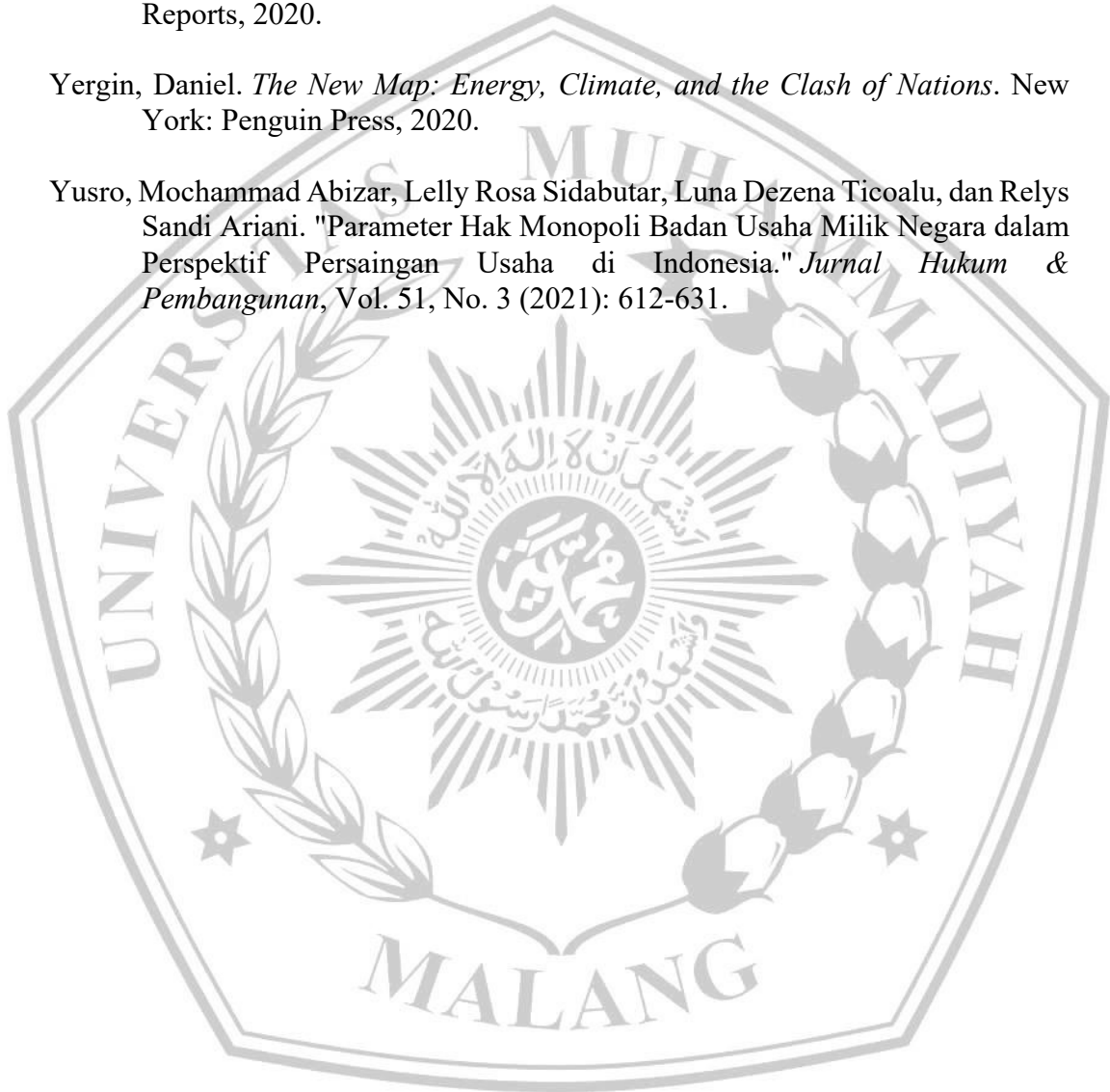
Usman, R. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Whish, Richard and David Bailey. *Competition Law*, 10th Edition. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Wu, T. *The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age*. Columbia Global Reports, 2020.

Yergin, Daniel. *The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations*. New York: Penguin Press, 2020.

Yusro, Mochammad Abizar, Lelly Rosa Sidabutar, Luna Dezena Ticoalu, dan Relys Sandi Ariani. "Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021): 612-631.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Diana Chilyatun Nailufar

Nim : 202210110311438

Dengan Judul Skripsi :

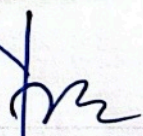
"ANALISIS YURIDIS POTENSI PELANGGARAN PASAL 17 DAN PASAL 19 UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM KEBIJAKAN PASOKAN BBM PERTAMINA KEPADA SPBU SWASTA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 30 Januari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum